e-ISSN: 2622-5549
DOI: https://doi.org/10.21009/jmenara.v21i1.55303

PENGARUH IMPLEMENTASI *SHOW CAUSE MEETING* PADA PROYEK JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

EFFECTIVENESS OF SHOW CAUSE MEETING IMPLEMENTATION ON WEST SUMATRA PROVINCE ROAD AND BRIDGE PROJECTS

Hari Sudiro[1], Taufika Ophiyandri[2], Benny Hidayat[3]
[1,2,3]Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Andalas
Kampus Unand Limau Manih, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, 25165, Indonesia
Email: bennyhidayat@eng.unand.ac.id
Received: 1 Mei 2025 Revised: 18 Juni 2025 Accepted: 20 Agustus 2025 Published: 21 Agustus 2025

ABSTRAK

Dalam pelaksanaan proyek konstruksi, masih ditemukan keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan. Untuk proyek yang telah memasuki fase kontrak kritis, perlu dilakukan rapat pembuktian atau Show Cause Meeting (SCM). Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas SCM pada proyek pembangunan jalan dan jembatan yang berada di bawah naungan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat. Dari analisis terhadap empat proyek konstruksi, keterlambatan pekerjaan diketahui dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pelaksanaan SCM mengacu pada Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR. Namun, waktu pelaksanaan dan target realisasi ditentukan berdasarkan hasil diskusi dalam rapat SCM, dengan mempertimbangkan kemampuan kontraktor serta kondisi lapangan. Secara umum, SCM mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan capaian progres pekerjaan, sehingga proyek dapat melewati tahap kontrak kritis dan terhindar dari risiko pemutusan kontrak.

Kata kunci: *Kontrak Kritis, Proyek Konstruksi, Rapat Pembuktian*

ABSTRACT

In the implementation of construction projects, delays in project completion are still frequently encountered. For projects that have entered the critical contract phase, it is necessary to conduct a Show Cause Meeting (SCM). This study aims to evaluate the effectiveness of SCM in road and bridge construction projects under the authority of the Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang of West Sumatra Province. Based on the analysis of four construction projects, it was found that delays were caused by various factors. The implementation of SCM refers to the Standard Operating Procedures issued by the Ministry of Public Works and Housing (PUPR). However, the timing and target outcomes of the Test Case are determined through mutual agreement during the SCM, taking into account the contractor's capacity and on-site conditions. Overall, SCM has been shown to have a positive impact on improving project progress, enabling projects to move beyond the critical contract phase and avoid contract termination.

Keywords: *Critical Contracts, Construction Projects, Show Cause Meeting*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan proyek konstruksi kerap menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya adalah keterlambatan pekerjaan yang disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor dari dalam (internal) maupun faktor dari luar (eksternal) proyek itu sendiri. Faktor internal meliputi permasalahan yang berasal dari pihak pemilik, pelaksana, maupun konsultan proyek, seperti keterbatasan sumber daya (material, tenaga kerja, dan peralatan), manajemen keselamatan kerja, pengelolaan proyek, kualitas pelaksanaan, serta struktur organisasi. Sementara itu, faktor eksternal mencakup gangguan dari lingkungan sekitar, kondisi sosial budaya masyarakat, peraturan pemerintah, hingga perubahan teknologi dan dinamika ekonomi (Wulandari dan Saidi, 2021).

Jalan merupakan bagian dari prasarana transportasi darat yang terdiri dari berbagai komponen pendukung untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas. Oleh karena itu, perencanaan pemeliharaan jalan yang baik menjadi aspek vital dalam pengelolaan infrastruktur transportasi (Hidayat dkk., 2020).

Sementara itu, jembatan adalah struktur yang dirancang untuk menghubungkan dua lokasi yang terpisah oleh rintangan, baik alami maupun buatan. Struktur jembatan terdiri atas dua komponen utama, yakni bangunan atas dan bangunan bawah (Hidayat dan Kamil, 2023).

Setiap proyek konstruksi pasti mengandung risiko yang dapat menghambat pencapaian target baik dari sisi *progress* pekerjaan maupun pencairan dana berdasarkan volume pekerjaan yang diselesaikan (Hidayat dan Syahra, 2023).

Keterlambatan dalam proyek memberikan dampak negatif bagi berbagai pihak: kontraktor akan menanggung biaya lebih besar, konsultan akan menghadapi hambatan dalam pekerjaan berikutnya, dan pemilik proyek mengalami kehilangan waktu serta potensi pendapatan dari aset yang belum bisa dimanfaatkan (Pane dkk., 2023).

Untuk menangani keterlambatan yang terjadi, terutama saat proyek dinyatakan masuk dalam kategori kontrak kritis, perlu adanya tindakan sesuai regulasi. Hal ini telah diatur dalam Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 mengenai standar pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia (Kementerian PUPR, 2020).

Mengacu pada SOP Kontrak Kritis dalam SOP/UPM/DJBM-100 Rev:2 Keluaran Tahun 2023 dari Direktorat Jenderal Bina Marga, suatu kontrak dikategorikan kritis apabila:

1. Pada periode I (0 – 70% *progress* fisik), selisih progres aktual lebih dari 10% dibanding rencana.
2. Pada periode II (realisasi fisik 70%–100% dari Kontrak), Progres realisasi fisik terlaksana lebih besar 5% dari rencana.
3. Pada Periode III (rencana fisik terlaksana 70%–100% dari Kontrak), Progres realisasi fisik terlaksana kecil dari 5% dari rencana dan pekerjaan dipastikan melewati tahun anggaran berjalan.

Jika keterlambatan disebabkan oleh kelalaian penyedia jasa, maka dapat dilakukan *Show Cause Meeting* (SCM). Namun, jika keterlambatan dipicu oleh keadaan *force majeure*, maka berlaku ketentuan khusus dalam kontrak. Apabila pengguna jasa menjadi penyebab keterlambatan, maka diterapkan ketentuan mengenai kompensasi (Direktorat Jendral Bina Marga, 2023).

Saat proyek memasuki fase kontrak kritis, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib melaksanakan SCM. Rapat ini bertujuan:

1. Memberikan kesempatan kepada kontraktor agar proyek bisa diselesaikan tanpa pemutusan kontrak

2. Sebagai implementasi dari ketentuan kontrak terhadap proyek yang terlambat
3. Menjadi media evaluasi penyebab keterlambatan serta rencana perbaikannya
4. Menetapkan target uji coba (*test case*) dengan rencana peningkatan kinerja (misalnya penambahan alat, tenaga, atau jam kerja)
5. Memantau pencapaian fisik proyek selama masa evaluasi
6. Menjadi dasar untuk tindakan lanjutan, termasuk pemberian sanksi apabila target tidak tercapai

Dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021, tugas utama PPK adalah mengawasi pelaksanaan kontrak agar berjalan sesuai rencana (Pemerintah Pusat, 2021).

Apabila terjadi deviasi, maka PPK harus mengeluarkan surat peringatan serta memulai proses kontrak kritis (Kementerian PUPR, 2011). rapat pembuktian/ *Show Cause Meeting* menjadi salah satu metode penyelesaian (Dewi, 2022).

Show Cause Meeting (SCM) adalah forum untuk mengklarifikasi penyebab keterlambatan, terutama yang terjadi karena kesalahan kontraktor, seperti kurangnya bahan, tenaga kerja, atau tidak mengantisipasi kondisi cuaca (Lasmini, 2024).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penyebab utama kontrak kritis dalam proyek konstruksi jalan dan jembatan di bawah naungan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini juga menelaah penerapan serta efektivitas SCM terhadap kinerja proyek.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi yang bermanfaat dalam mengungkap faktor-faktor penyebab kontrak kritis, menjelaskan tahapan pelaksanaan SCM, serta menunjukkan dampaknya terhadap kemajuan proyek. SCM dapat dimanfaatkan sebagai forum komunikasi dan solusi bersama untuk memastikan proyek tetap berjalan optimal. Selain itu, SCM juga berperan dalam memperkuat manajemen proyek agar dapat melakukan perencanaan ulang berdasarkan kondisi terkini dan menghindari pemborosan waktu serta sumber daya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode utama. Data kualitatif diperoleh melalui proses komunikasi terbuka atau percakapan langsung. Metode ini fokus pada pertanyaan yang menggali “apa” yang dipikirkan oleh narasumber dan “mengapa” mereka memiliki pandangan tersebut. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi informasi secara mendalam melalui tanya jawab, dengan respons narasumber menjadi landasan untuk menggali lebih lanjut. Selain itu, peneliti dapat menangkap nuansa emosional dan motivasi dari narasumber selama proses wawancara berlangsung.

Lokasi penelitian difokuskan pada proyek jalan dan jembatan di bawah tanggung jawab Bidang Bina Marga, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat. Objek penelitian ini terdapat pada tiga pekerjaan dibidang jalan dan satu pekerjaan dibidang jembatan yang tersaji pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Objek Penelitian Pelaksanaan *Show Cause Meeting*

No.	Nama Pekerjaan	Tahun Anggaran
1.	Penanganan *Longsegment* Jalan Kantor Camat - Berkat (P.104) DAK	2024
2.	Penanganan *Longsegment* Jalan Batu Sangkar - Ombilin (P.070) DAK	2024
3.	Penanganan *Longsegment* Jalan Sicincin - Kurai Taji (P.028) DAK	2023

No.	Nama Pekerjaan	Tahun Anggaran
4.	Pembangunan Jembatan Rumah Sakit Unand	2023

Teknik pemilihan narasumber dilakukan melalui metode purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Narasumber yang dipilih adalah individu yang dianggap memahami isu secara mendalam atau memiliki pengalaman langsung terkait permasalahan yang diteliti (Howay dkk., 2022). Informan terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), staf teknik, pihak kontraktor, serta konsultan pengawas yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan proyek. Dari total 16 orang yang direncanakan untuk diwawancara, hanya 11 narasumber yang berhasil ditemui dan bersedia memberikan keterangan. Beberapa di antaranya menolak wawancara karena menganggap topik terkait *Show Cause Meeting* sebagai isu yang sensitif.

Data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam *Show Cause Meeting* pada proyek yang dilaksanakan oleh Bidang Bina Marga. Sementara itu, data sekunder diambil dari dokumen teknis pelaksanaan *Show Cause Meeting*. Tabel 2 menunjukkan rangkuman pertanyaan yang diajukan kepada narasumber.

Tabel 2. Daftar Pertanyaan Pelaksanaan *Show Cause Meeting*

No.	Daftar Pertanyaan
1.	Apa masalah yang terjadi saat pekerjaan yang menyebabkan kontrak menjadi kritis? Mengapa?
2.	Dalam menyelesaikan volume sisa, apa langkah-langkah penting yang menjadi pertimbangan responden dalam menetapkan target serta waktu saat pelaksanaan test case SCM? Mengapa?
3.	Pada target dan waktu yang telah ditetapkan bersama saat pelaksanaan *test case* SCM, apakah bisa dilakukan untuk penyelesaian pekerjaan?
4.	Bagaimana peranan/ tindakan/ evaluasi dari narasumber pada pelaksanaan SCM?
5.	Apakah tindakan/ peranan/ evaluasi dari narasumber tersebut berpengaruh terhadap tercapainya pelaksanaan pada *Show Cause Meeting* (SCM)?
6.	Saat pelaksanaan test case rapat *Show Cause Meeting* (SCM), Apa saja kendala yang dihadapi? Mengapa?

Peneliti berupaya untuk memahami jawaban narasumber berdasarkan pengalaman dan sudut pandang mereka masing-masing. Teknik analisis data yang digunakan peneliti pada penelitian ini dengan metode Analisis Tematik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan wawancara dengan para informan yang terlibat dalam proyek tersebut, peneliti melanjutkan ke tahap analisis data. Proses ini diawali dengan mengorganisasi dan mengelompokkan data hasil wawancara, yang kemudian ditranskrip secara sistematis. Transkrip tersebut dipelajari berulang kali guna memperoleh pemahaman menyeluruh, serta untuk mengidentifikasi tema-tema utama dari jawaban para narasumber. Tahapan selanjutnya melibatkan proses konseptualisasi, pengelompokan kategori, identifikasi tema, dan klasifikasi informasi yang disesuaikan dengan teori yang relevan. Apabila ditemukan hal-hal yang masih meragukan, peneliti melakukan konfirmasi

ulang dengan narasumber melalui wawancara lanjutan untuk memperjelas makna dari informasi yang diperoleh.

Wawancara dilakukan kepada 11 orang narasumber yang seluruhnya adalah laki-laki, dan mereka terlibat langsung dalam keempat paket proyek jalan dan jembatan yang sedang menjalani proses SCM di lingkungan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat. Demi menjaga kerahasiaan identitas para informan, peneliti menggunakan kode khusus berupa R1 hingga R11, mengingat isu yang dibahas tergolong sensitif bagi sebagian narasumber. Semua hasil wawancara kemudian disusun dalam bentuk transkrip dan dijadikan dasar untuk tahap analisis lebih lanjut.

Secara garis besar faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan *Show Cause Meeting* dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.

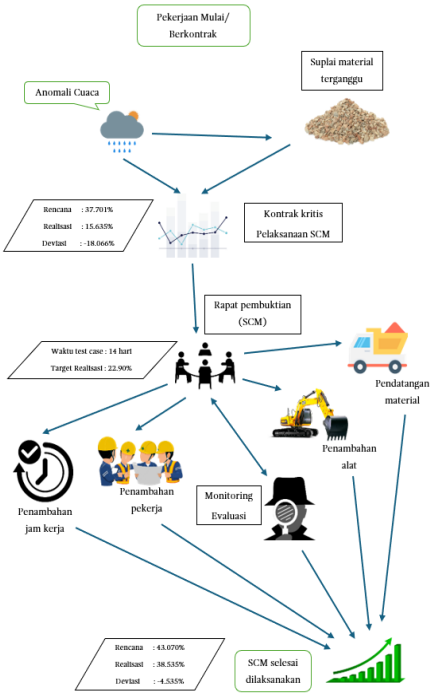
Tabel 3. Faktor-faktor yang Menyebabkan Pelaksanaan *Show Cause Meeting*

No.	Koding	Frekuensi	Presentase (%)
1.	Keuangan	4	20
2.	Cuaca	4	20
3.	Manajemen	3	15
4.	Alat	3	15
5.	Material	2	10
6.	Lahan	2	10
7.	Metoda	1	5
8.	*Design*	1	5
Jumlah		**20**	**100**

Dari delapan faktor penyebab munculnya kontrak kritis yang mengharuskan pelaksanaan *Show Cause Meeting*, ditemukan bahwa salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap faktor-faktor lainnya adalah kondisi finansial dari pihak penyedia jasa. Ketidaklancaran keuangan dari penyedia jasa menyebabkan timbulnya berbagai hambatan dalam proyek, antara lain:

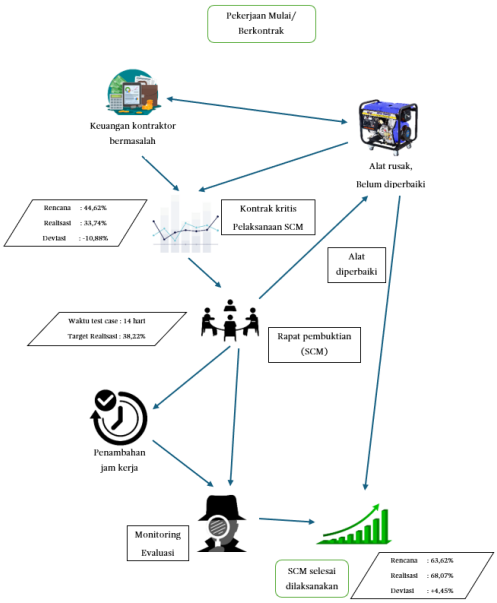
1. Proses perbaikan alat yang rusak tertunda karena tidak tersedia dana operasional secara langsung.
2. Terlambatnya pengadaan material disebabkan tidak adanya anggaran pembelian.
3. Penambahan peralatan untuk menunjang percepatan pekerjaan tidak berjalan maksimal akibat keterbatasan dana.
4. Kesulitan dalam penambahan tenaga kerja dan pengaturan jam lembur karena adanya hambatan dalam pembayaran upah.

Gambar 1 menunjukkan situasi *Rich Picture Diagram* proses pelaksanaan SCM pekerjaan Penanganan *Longsegment* Jalan Kantor Camat - Berkat (P.104) DAK.



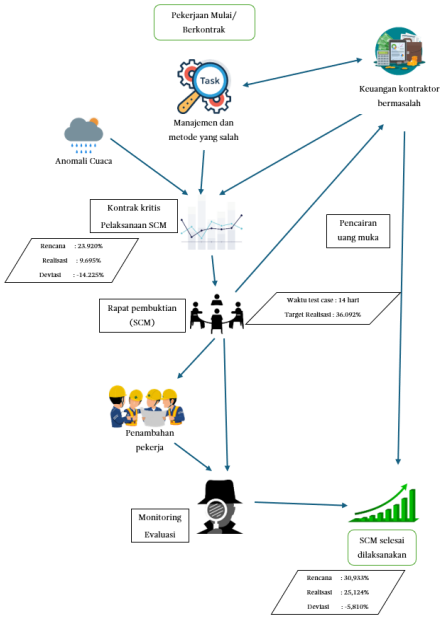
Gambar 1. *RPD* pada Pelaksanaan SCM Pekerjaan Penanganan *Longsegment* Jalan Kantor Camat - Berkat (P.104) DAK

Gambar 2 menunjukkan situasi *Rich Picture Diagram* proses pelaksanaan SCM pekerjaan penanganan *longsegment* Jalan Batu Sangkar - Ombilin (P.070) DAK.



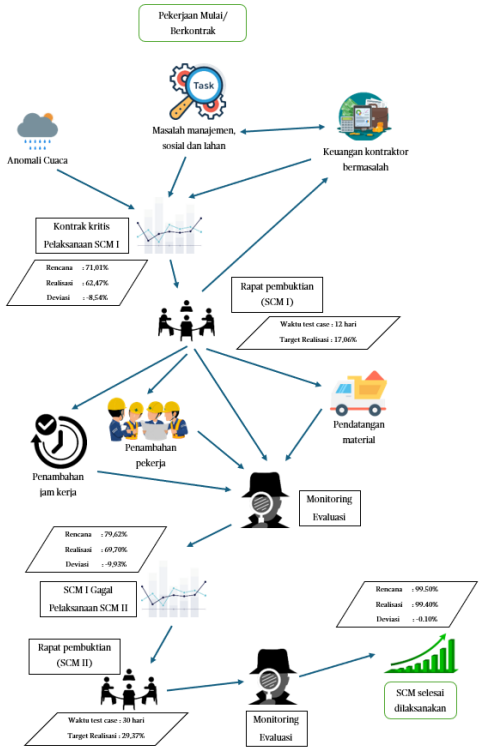
Gambar 2. *RPD* pada Pelaksanaan SCM Pekerjaan Penanganan *Longsegment* Jalan Batu Sangkar - Ombilin (P.070) DAK

Gambar 3 menunjukkan situasi *Rich Picture Diagram* proses pelaksanaan SCM pekerjaan penanganan *longsegment* Jalan Sicincin - Kurai Taji (P.028) DAK.



Gambar 3. *RPD* pada Pelaksanaan SCM pekerjaan Penanganan *Longsegment* Jalan Sicincin - Kurai Taji (P.028) DAK

Gambar 4 menunjukkan situasi *Rich Picture Diagram* proses pelaksanaan SCM pekerjaan pembangunan jembatan Rumah Sakit Unand.

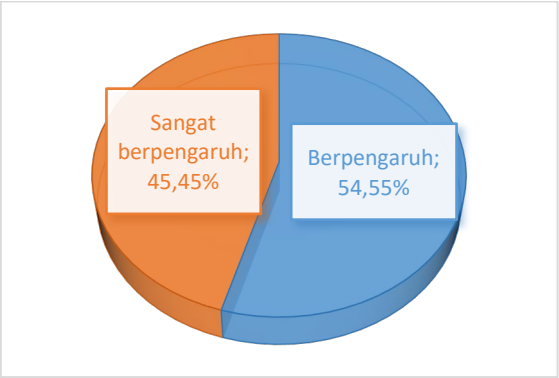


Gambar 4. *RPD* pada Pelaksanaan SCM Pekerjaan Pembangunan Jembatan Rumah Sakit Unand

Pelaksanaan *Show Cause Meeting* mengikuti pedoman yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh Kementerian PUPR. Dimulai dari indikasi awal keterlambatan, penetapan status kontrak kritis, penyelenggaraan *Show Cause Meeting*, hingga uji coba perbaikan (*test case*) sampai dengan penyelesaian pekerjaan.

Durasi pelaksanaan uji coba ini relatif singkat, yaitu berkisar antara 14 hingga 30 hari, dengan target pencapaian fisik sebesar 20–40%. Target ini dianggap wajar oleh para kontraktor, karena telah disepakati bersama dalam rapat SCM, serta dimaksudkan untuk memberikan kesempatan perbaikan sebelum

keputusan pemutusan kontrak diberlakukan. Ketika proyek memasuki fase kontrak kritis dan digolongkan sebagai pekerjaan prioritas, semua pihak yang terlibat sepakat untuk menyelesaikan bagian pekerjaan yang memiliki bobot besar dalam masa *test case*. Proyek infrastruktur seperti jalan dan jembatan memiliki karakteristik kompleks dengan banyak item pekerjaan yang saling bergantung, sehingga penyelesaian dalam waktu terbatas membutuhkan kesiapan ekstra dari kontraktor, baik dari sisi dana, alat, maupun tenaga kerja. Gambar 5 dibawah ini menunjukkan presentase pengaruh pelaksanaan *Show Cause Meeting*.



Gambar 5. Grafik Presentase dari Pengaruh Pelaksanaan *SCM*

Show Cause Meeting terbukti memberikan dampak positif terhadap pencapaian target pekerjaan dalam batas waktu yang ditentukan. Ketika keterlambatan dan kontrak kritis tidak dapat dielakkan, penting bagi semua pihak terkait—baik pemilik proyek, penyedia jasa (kontraktor), maupun konsultan pengawas—untuk menjalankan peran mereka masing-masing secara optimal. Kolaborasi tersebut berkontribusi besar dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan *Show Cause Meeting*. Hal ini dibuktikan melalui pencapaian hasil yang baik, sehingga proyek tetap dapat dilanjutkan tanpa harus dilakukan pemutusan kontrak.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kontrak kritis serta pelaksanaan *Show Cause Meeting*, ditemukan bahwa kondisi keuangan penyedia jasa merupakan faktor dominan yang turut mempengaruhi munculnya permasalahan lain dalam proyek konstruksi.

Proses pelaksanaan *Show Cause Meeting* telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Prosedur tersebut meliputi tahapan dari indikasi awal keterlambatan, penetapan kontrak sebagai kontrak kritis, pelaksanaan *Show Cause Meeting*, masa uji coba (*test case*), hingga penyelesaian pekerjaan.

Pelaksanaan *Show Cause Meeting* dalam penelitian ini terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan progres fisik proyek. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target pekerjaan sehingga kontrak tidak perlu diputus, dan proyek tetap dapat dilanjutkan.

Keberhasilan pelaksanaan *Show Cause Meeting* sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif dari seluruh pihak terkait, baik dari pemilik pekerjaan (*owner*), penyedia jasa (kontraktor), maupun konsultan pengawas. Sinergi di antara ketiga pihak tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap efektivitas proses SCM.

Sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan *Show Cause Meeting* di masa yang akan datang, disarankan agar penelitian lanjutan dapat dilakukan secara lebih mendalam dengan pendekatan komparatif. Penelitian tersebut dapat membandingkan implementasi SCM antar bidang, misalnya antara Bidang Bina Marga dengan Bidang Cipta Karya, ataupun antar instansi seperti Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dengan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat atau instansi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Dewi, N. P. I. C. (2022). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Konstruksi Di Kabupaten Badung. *Universitas Mahasaraswati Denpasar*.

Hidayat, B. dan Kamil, I. (2023). Penilaian Kondisi Jembatan di Kabupaten Sijunjung. *Jurnal Bangunan: Konstruksi & Desain*, *1*(2), 99–108.

Hidayat, B. dan Syahra, R. A. (2023). Identifikasi Tingkat Penggunaan Laporan Harian pada Proyek Konstruksi. *Jurnal Bangunan, Konstruksi & Desain*, *1*(1), 1–10.

Hidayat, I., Hidayat, B. dan Ophiyandri, T. (2020). Penentuan Prioritas Pemeliharaan Jalan: Studi Kasus Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat. *Rang Teknik Journal*, *3*(2), 186-194.

Howay, I., Bachmid, S. dan Supardi, S. (2022). Analisis Faktor yang Berpengaruh terhadap Akurasi Biaya pada Tahap Desain Proyek Jalan Nasional: Studi Kasus Peningkatan Jalan Basuki Rahmat Kota Sorong. *Jurnal Konstruksi: Teknik, Infrastruktur, dan Sains*, *1*(7), 30–39.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2011). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/Prt/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi*. Jakarta.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2020). *Peraturan*

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2020). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia*. Jakarta.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). *Standar Operasional Prosedur Kontrak Kritis SOP/UPM/DJBM-110 Rev: 02*. Jakarta

Lasmini, T. (2024). *Buku Panduan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Konstruksi di Kota Bandung*. Bandung: Bagian Administrasi Pembangunan Kota Bandung.

Pane, M. N., Mardiaman., Azhar, M. (2023). Penentuan Faktor Keterlambatan Waktu Pelaksanaan Proyek APBN/APBD dengan Anggaran Tahun Tunggal untuk Mengurangi Klaim. *Menara : Jurnal Teknik Sipil, 18* (2), 96-109.

Pemerintah Pusat. (2021). *Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta.

Wulandari, E. dan Saidi, W. I. S. (2021). Faktor-faktor Eksternal dan Internal dalam Efektivitas Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hotel Ashley Sabang. *Jurnal Konstruksia*, *12*(2), 88-104.